



RENCANA

KERJA TAHUNAN SPPMHKP BENGKULU

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun PPMHKP Bengkulu) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka Stasiun KIPM Bengkulu menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).

3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Bengkulu Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Bengkulu untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun PPMHKPM Bengkulu di tahun kedepannya.

Demikian RKT Stasiun PPMHKP Bengkulu Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Bengkulu, 31 Januari 2026
Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kuku Andias Purbianto, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
Pendahuluan	6
Latar Belakang	6
Tugas dan Peran Organisasi.....	6
Tujuan	8
Manfaat.....	9
Sasaran	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	10
Arah Kebijakan	13
Sasaran Strategis SPPMHKP dan Indikator Kinerja.....	13
Penutup	22

Tabel 1. Indikator Kinerja SPPMHKP TA 2026.....	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Tahun 2026	18
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program Stasiun, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SPPMHKP Bengkulu tahun 2026.....	22

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKPBengkulu 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang tetap harus



menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di

pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Stasiun PPMHKP Bengkulu sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Bengkulu Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun PPMHKP Bengkulu pada tahun 2026.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKP Bengkulu dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Bengkulu adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Bengkulu Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Bengkulu tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) SPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun PPMHKP Bengkulu pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan

Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2026 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsi nya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat,

- surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi SPPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar

dan regulasi nasional.

2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan

negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Stasiun KIPM Bengkulu telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Stasiun KIPM Bengkulu telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu TA 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2026
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Sertifikat Kelayakan Pengelolaan, Sertifikat Penerapan distribusi ikan	20
		2	Sertifikat Penerapan distribusi ikan	4

	Sertifikat Penerapan distribusi ikan	3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Bengkulu (Produk)	3
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	71
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup SPPMHKP				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SPPMHKP Bengkulu (Indeks)	82,5
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai))	77
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	92,1

		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	77
		12	Indek kepuasan Masyarakat Lingkungan Stasiun PPMHKP Bengkulu (indeks	3.5

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Bengkulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Kelautan Perikanan Bengkulu Tahun 2026

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SPPMHKP BENGKULU 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
SK .I	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikana	1,	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	71

SK. II	Terselenggarakan ya pengendalian sistem jaminan mutu	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	71
SK.III	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bengkulu	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	77
		12.	Indek kepuasan Masyarakat Stasiun PPMHKP Bengkulu (indeks)	3.5



Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT . Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu



antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai.

Rencana Kerja Stasiun PPMHKP Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Stasiun PPMHKP Bengkulu tahun anggaran 2025 sebesar **Rp.3.091.030.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun PPMHKP Bengkulu untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun KIPM Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keahlian dan Perikanan
PPMHKP Bengkulu Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	132.850.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	62.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	2.895.953.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Bengkulu Tahun 2026		3.091.303.000

PENUTUP

Rencana kerja Stasiun Pengendalian Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan Perikanan pada TA 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Stasiun PPMHKP Bengkulu antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kukuh Andias Purbianto**
Jabatan : Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Bengkulu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kukuh Andias Purbianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BENGKULU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bengkulu	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	132.850.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	62.500.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	2.895.953.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Bengkulu Tahun 2026		3.091.303.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bengkulu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kukuh Andias Purbianto

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,735,687,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC 3989 3989.PDC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sertifikasi Produk[Base Line]	9.0 produk		146,814,000 84,314,000 38,350,000	
3989.PDC.002 051 A	Lokasi : KOTA BENGKULU Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Validasi produk pada sektor produksi pasca panen Prosentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan	9.0 produk		38,350,000 38,350,000 20,000,000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.016-Bengkulu) - Konsumsi dan Snack Help Desk Percepatan Sertifikasi SPDI	65.0 OK	64,000	4,160,000 4,160,000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu) - Uang Harian Audit/Inspeksi SPDI [2 Org x 2 Lokas x 2 Hari] - Penginapan Audit/Inspeksi SPDI [2 Org x 2 kali x 1 hari] - Tiket dan Transport Audit/Inspeksi SPDI	8.0 OH 4.0 OH 16.0 OK	380,000 250,000 100,625	3,040,000 1,000,000 1,610,000	* * *
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.016-Bengkulu) - Inspeksi SPDI [2 Org x 20 kali x 1 Hari]	40.0 OH	100,000	4,000,000 4,000,000	A *
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.016-Bengkulu) - Uang Harian Fullboard [1 Org x 1 Lokas x 3 Hari] - Hotel/Penginapan [1 Org x 1 kali x 2 hari] - Tiket dan Transport	3.0 OH 2.0 OH 1.0 OK	130,000 780,000 4,240,000	390,000 1,560,000 4,240,000	* * *
B	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar			7,125,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu) - Uang Harian Sertifikasi SKP [4 Org x 1 Kali x 1 Hari] - Transportasi dan Tiket Sertifikasi SKP	4.0 OH 8.0 OK	380,000 178,125	1,520,000 1,425,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.016-Bengkulu) - Surveilen dan Inspeksi SKP	44.0 OH	95,000	4,180,000	PNP
C	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI			1,225,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.016-Bengkulu) - Surveilen dan Inspeksi HACCP	12.0 OH	102,084	1,225,000	RM
D	Bahan Uji Laboratorium			10,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,735,687,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.016-Bengkulu) - Bahan Uji Laboratorium	1.0 Pkt	10,000,000	10,000,000	A
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	16.0 Lembaga, Badan Usaha		29,964,000	*
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA BENGKULU Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	16.0 Lembaga		29,964,000	
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			29,964,000	U
A	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan			23,794,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu)			23,794,000	
	- Uang Harian Audit/Inspeksi CBIB [3 Org x 20 Lokas x 1 Hari]	60.0 OH	380,000	22,800,000	
	- Tiket dan Transport Audit/Inspeksi CBIB	8.0 OK	124,250	994,000	
B	Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan			3,520,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.016-Bengkulu)			3,520,000	
	- Snack Konsumsi Percepatan Sertifikasi CPIB Kapal	22.0 OK	60,000	1,320,000	
	- Transport peserta	22.0 OK	100,000	2,200,000	
C	Sertifikasi CPIB pada Pembenihan			2,650,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu)			2,650,000	
	- Uang Harian Audit/Inspeksi CPIB pada Pembenihan [4 Org x 1 Lokas x 1 Hari]	4.0 OH	380,000	1,520,000	
	- Tiket dan Transport Audit/Inspeksi CPIB pada Pembenihan	8.0 OK	141,250	1,130,000	
3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk		10,000,000	
3989.QIA.001	Lokasi : KOTA BENGKULU Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	1.0 Produk		10,000,000	
051	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik			10,000,000	U
A	Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI (PNP)			10,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.016-Bengkulu)			1,240,000	
	- Pembelian sampel Ikan	2.0 PKT	620,000	1,240,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu)			8,760,000	A
	- Transport Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik	24.0 OK	100,000	2,400,000	*
	- Uang Harian Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik [3 Org x 2 Kali x 2 Hari]	12.0 OH	380,000	4,560,000	*
	- Penginapan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik [3 Org x 2 Kali x 1 Hari]	6.0 OH	300,000	1,800,000	*
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	4.0 Lembaga		6,000,000	
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA BENGKULU UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.0 Lembaga		6,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,735,687,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			6,000,000	U	
A	Evaluasi Kesesuaian Ruang Lingkup HACCP pada UPI			5,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,000,000	A	PNP
	(KPPN.016-Bengkulu)					
	- Uang Harian Evaluasi Kesesuaian Ruang Lingkup HACCP [1 Org x 1 Kali x 3 Hari]	3.0 OH	530,000	1,590,000	*	
	- Transportasi dan Tiket Temu Teknis	2.0 OK	1,200,000	2,400,000		
	- Hotel/Penginapan Temu Teknis [1 Org x 2 Hari]	2.0 OH	505,000	1,010,000		
B	Jumlah Unit Produksi Primer yang Konsisten Menerapkan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			1,000,000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,000,000	A	PNP
	(KPPN.016-Bengkulu)					
	- Translok dalam rangka Surveilen CPIB Kapal	10.0 OK	100,000	1,000,000	*	SBM
7010	Manajemen Mutu			62,500,000		
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan		35,500,000		
	Lokasi : KOTA BENGKULU					
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		35,500,000		
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			35,500,000	U	
A	ISO 17020			35,500,000		
522191	Belanja Jasa Lainnya			22,000,000	A	PNP
	(KPPN.016-Bengkulu)					
	- Biaya Surveilen	1.0 Skema	14,000,000	14,000,000	*	
	- Biaya Pendaftaran [0 O]	1.0 Pkt	5,000,000	5,000,000	*	
	- Iuran Tahunan	1.0 Pkt	1,500,000	1,500,000	*	
	- Biaya Pertanggunggugatan	1.0 Pkt	1,500,000	1,500,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13,500,000	A	PNP
	(KPPN.016-Bengkulu)					
	- PErdin	1.0 OK	13,500,000	13,500,000	*	
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga		27,000,000		
	Lokasi : KOTA BENGKULU					
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		27,000,000		
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			27,000,000	U	
A	ISO 17025			27,000,000		
522191	Belanja Jasa Lainnya			18,500,000	A	PNP
	(KPPN.016-Bengkulu)					
	- Biaya Surveilen	1.0 Skema	7,000,000	7,000,000		
	- Uji Profisiensi/Uji Banding	4.0 Pkt	2,500,000	10,000,000	*	
	- Iuran Tahunan	1.0 Thn	1,500,000	1,500,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,735,687,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu) - Transportasi dan Tiket Pesawat Asesor 17025 - Penginapan Asesor 17025 [1 Org x 5 Hari] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu) [1 Org x 5 Hari]	2.0 OK 5.0 OH 5.0 OH	1,350,000 780,000 380,000	8,500,000 2,700,000 3,900,000 1,900,000	A * * SBM SBM
032.13.WA 3987 3987.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		2,588,873,000 2,588,873,000 2,588,873,000	
3987.EBA.962 051 A 524111	Lokasi : KOTA BENGKULU Layanan Umum Layanan Umum dan Rumah Tangga Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu) - Penginapan Rapat Permasalahan Operasional [3 Org x 2 Hari] - Uang Harian Rapat Permasalahan Operasional [2 Org x 4 Hari] - Transportasi dan Tiket	1.0 Layanan 6.0 OH 8.0 OH 2.0 OK		36,190,000 36,190,000 11,869,000 11,869,000	U RM
B 524111	Rekonsiliasi SAKTI Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.016-Bengkulu) - Penginapan Sinkonisasi Data Sakti [3 Org x 2 Hari] - Uang Harian Sinkonisasi Data Sakti [4 Org x 2 Hari] - Transportasi dan Tiket Singkronisasi Data Sakti BMN SMT 1, SMT 2			20,000,000 20,000,000	RM
F 521211	Layanan Kearsipan Belanja Bahan (KPPN.016-Bengkulu) - ATK			353,000 353,000	RM
I 521211	Koordinasi/ konsultasi perencanaan Belanja Bahan (KPPN.016-Bengkulu) - ATK dan Penggandaan	1.0 PKT	353,000	845,000 845,000	RM
J 521211	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Belanja Bahan (KPPN.016-Bengkulu) - ATK dan Penggandaan	3.0 Pkt	1,041,000	3,123,000 3,123,000	RM
3987.EBA.994 001	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	1.0 Layanan		2,552,683,000 1,779,855,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,735,687,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			1,779,855,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.016-Bengkulu)			457,644,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS, gaji13 dan gaji 14	1.0 THN	457,644,000	457,644,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.016-Bengkulu)			10,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS, gaji13 dan gaji 14	1.0 THN	9,782	10,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.016-Bengkulu)			33,730,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS , gaji13 dan gaji 14	1.0 THN	33,730,292	33,730,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.016-Bengkulu)			10,026,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS, gaji13 dan gaji 14	1.0 THN	10,025,572	10,026,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.016-Bengkulu)			6,789,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS, gaji13 dan gaji 14	1.0 THN	6,788,708	6,789,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.016-Bengkulu)			28,118,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS dan gaji 13	1.0 THN	28,118,359	28,118,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.016-Bengkulu)			2,247,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	2,247,212	2,247,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.016-Bengkulu)			22,879,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	22,879,120	22,879,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.016-Bengkulu)			91,080,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	91,080,000	91,080,000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.016-Bengkulu)			10,623,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS, gaji13 dan gaji14	1.0 THN	10,623,252	10,623,000	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK (KPPN.016-Bengkulu)			205,500,000	RM
	- Gaji Pokok PPPK, Gaji 13 dan Gaji 14	1.0 THN	205,500,000	205,500,000	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (KPPN.016-Bengkulu)			10,000	RM
	- Pembulatan	1.0 THN	10,000	10,000	
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (KPPN.016-Bengkulu)			23,100,000	RM
	- Tunjangan suami/istri	1.0 THN	23,100,000	23,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,735,687,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Tunjangan anak	1.0 THN	9,000,000	9,000,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Tunjangan Fungsional	1.0 THN	978,200	978,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Tunjangan Beras	1.0 THN	20,300,000	20,300,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Uang Makan	1.0 THN	67,525,000	67,525,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Tunjangan Umum	1.0 THN	10,878,000	10,878,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Lembur Pegawai	1.0 Tahun	119,000,000	119,000,000	RM
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Lembur PPPK	1.0 Tahun	25,200,000	25,200,000	RM
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Tunjangan Kinerja Pegawai	1.0 Tahun	447,270,600	447,270,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	187,948,800	187,948,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			772,828,000	U
A	<i>Pengadaan Pakaian Dinas</i>			<i>12,200,000</i>	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Seragam PDH KKP [13 Peg x 1 Stel]	13.0 Peg	938,462	12,200,000	RM
B	<i>Pas bandara dan pelabuhan</i>			<i>1,643,000</i>	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.016-Bengkulu) - Pas Kendaraan/ Pelabuhan	1.0 Peg	1,643,000	1,643,000	RM
C	<i>Pemeliharaan Kendaraan Roda-4</i>			<i>41,000,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649622) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 2,735,687,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.016-Bengkulu)			41,000,000	RM
	- Roda-4 Double gardan	1.0 Unit	24,000,000	24,000,000	
	- Roda-4	1.0 Unit	17,000,000	17,000,000	
D	<u>Pemeliharaan Kendaraan roda-2</u>			16,200,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.016-Bengkulu)			16,200,000	
	- Kendaraan roda-2	5.0 Unit	3,240,000	16,200,000	
E	<u>Pajak kendaraan operasional</u>			8,558,000	RM
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.016-Bengkulu)			8,558,000	
	- Pajak kendaraan roda-4	3.0 Unit	2,445,500	7,336,000	
	- pajak kendaraan roda-2	5.0 Unit	244,550	1,222,000	RM
F	<u>Perawatan Gedung dan Bangunan</u>			169,084,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.016-Bengkulu)			169,084,000	
	- Perawatan R. Genset	1.0 THN	2,812,000	2,812,000	RM
	- Perawatan Gedung Lab. SKI	1.0 THN	32,287,000	32,287,000	
	- Perawatan gedung layanan dan gedung induk	1.0 THN	71,437,000	71,437,000	
	- Perawatan Gedung Tempat Tinggal	1.0 THN	8,512,000	8,512,000	RM
	- Perawatan Gedung Aula	1.0 THN	8,437,000	8,437,000	
	- Perawatan Ruang Arsip	1.0 THN	3,937,000	3,937,000	
	- Perawatan halaman gedung SKIPM Bengkulu	1.0 THN	4,050,000	4,050,000	RM
	- Perawatan dan pemeliharaan akuarium Edukasi	1.0 THN	27,000,000	27,000,000	
	- Perawatan pagar kantor	1.0 PKT	7,800,000	7,800,000	
	- perawatan Pos Security	1.0 THN	2,812,000	2,812,000	RM
G	<u>Jamuan Tamu/ pertemuan</u>			17,930,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.016-Bengkulu)			10,480,000	
	- Biaya Konsumsi Jamuan Makan	1.0 Thn	10,480,000	10,480,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.016-Bengkulu)			7,450,000	
	- Belanja Sewa insidensil (Kendaraan Roda 4)	1.0 THN	7,450,000	7,450,000	
H	<u>Perbaikan Peralatan Kantor</u>			131,450,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.016-Bengkulu)			40,000,000	
	- Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 Pkt	40,000,000	40,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649622)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 2,735,687,000	

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.016-Bengkulu)			91,450,000	RM
	- Pemeliharaan Server	1.0 Paket	6,550,000	6,550,000	
	- Perawatan peralatan laboratorium	1.0 PKT	15,416,000	15,416,000	
	- Laptop	1.0 THN	5,142,000	5,142,000	
	- Komputer	1.0 THN	2,570,000	2,570,000	
	- AC Split	1.0 THN	5,612,000	5,612,000	
	- Pemeliharaan CCTV	1.0 PKT	9,000,000	9,000,000	
	- Pemeliharaan Alat Vicon	1.0 Paket	10,800,000	10,800,000	
	- Pemeliharaan Anjungan Informasi/ Digital LED Running text	1.0 Paket	4,500,000	4,500,000	
	- Pemeliharaan Genset	2.0 UNIT	13,500,000	27,000,000	SBM
	- Printer	1.0 THN	4,860,000	4,860,000	
I	<u>Langganan daya dan Jasa</u>			138,743,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.016-Bengkulu)			45,023,000	RM
	- Langganan Gas/ Isi Ulang Apar	12.0 Bulan	318,606	3,823,000	
	- Langganan Internet Kantor	12.0 BLN	3,433,334	41,200,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.016-Bengkulu)			2,520,000	RM
	- Pengiriman surat dan dokumen	1.0 THN	2,520,000	2,520,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.016-Bengkulu)			84,000,000	RM
	- Listrik SKIPM Bengkulu	12.0 Bulan	7,000,000	84,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.016-Bengkulu)			7,200,000	RM
	- Langganan TLP	12.0 Bulan	600,000	7,200,000	
J	<u>Keperluan Sehari-hari perkantoran</u>			19,660,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.016-Bengkulu)			5,000,000	RM
	- Keperluan Rumah tangga	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.016-Bengkulu)			14,660,000	RM
	- Keperluan Sehari hari (Memiliki sampai dengan 40 pegawai pada satker)	1.0 PKT	14,660,000	14,660,000	
K	<u>Honor Satuan Kerja</u>			216,360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649622)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 2,735,687,000	

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.016-Bengkulu)			91,560,000	RM
	> Honor Pengelola Anggaran			60,120,000	
	- PPSPM	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	410,000	4,920,000	
	- Staff Pengelola Anggaran	72.0 OB	300,000	21,600,000	
	- KPA	12.0 OB	1,180,000	14,160,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,150,000	13,800,000	
	> Honor Pengelola PNB			600,000	
	- Bendaharan PNPB	3.0 OB	200,000	600,000	
	> Honor Pengelola SAKPA			18,360,000	
	- Koordinator SAKPA	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Ketua SAKPA	12.0 OB	240,000	2,880,000	
	- Anggota SAKPA	36.0 OB	210,000	7,560,000	
	- Penanggung jawab SAKPA	12.0 OB	360,000	4,320,000	
	> Honor SABMN			12,480,000	
	- Pengurus BMN dan Persediaan	24.0 OB	180,000	4,320,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan	12.0 OB	680,000	8,160,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			124,800,000	RM
	(KPPN.016-Bengkulu)				
	- Honorarium Outsourcing Satpam dan Pramubakti Bengkulu [1 THN]	1.0 OB	124,800,000	124,800,000	

Bengkulu, 17 Juni 2026

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

KUKUH ANDIAS PURBIANTO, S.Pi

Nip 198105212005021002